

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing misi sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Pertama

Misi Pertama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dan kesetaraan gender serta memantapkan landasan etik dan moral untuk mewujudkan kondisi aman, damai, nyaman, tertib, dan disiplin.

6.1.1. Strategi Misi Pertama

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Pertama, sebagai berikut.

1. Pemantapan sinkronisasi aparat penegak hukum dan jajarannya.
2. Penyesuaian produk hukum daerah dengan yang baru/lebih tinggi dan keserasian dengan perundang-undangan daerah.
3. Revitalisasi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).
4. Pemantapan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Peningkatan rasa saling percaya dan hubungan harmonis antar kelompok masyarakat (etnik dan budaya).
6. Pemantapan peran kelembagaan keagamaan.
7. Pemantapan fungsi pranata sosial (keluarga, kepanduan, paguyuban) dan peran kelompok profesional.
8. Pemantapan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan.
9. Peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui upaya pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik yang efektif.
10. Peningkatan wawasan Kebangsaan bagi pemuda dan atlit berprestasi

6.1.2. Arah Kebijakan Misi Pertama

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Pertama, sebagai berikut.

1. Mendorong koordinasi antar aparat penegak hukum dan jajarannya secara rutin untuk terciptanya sinkronisasi dalam penegakkan hukum yang berkeadilan.
2. Melakukan pengkajian, pengendalian dan evaluasi produk hukum daerah serta penyebaran peraturan perundang-undangan daerah.
3. Melakukan revitalisasi HANKAMRATA untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri.
4. Mendorong pengembangan kearifan lokal serta budaya taat hukum di kalangan masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih kondusif.
5. Mendorong silaturahmi dan kerjasama antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda agama, etnik, maupun golongan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan hubungan yang harmonis antar kelompok-kelompok masyarakat.

6. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan fungsi/peran kelembagaan agama sebagai institusi yang mendorong pengembangan iman dan keselarasan hidup inter dan antar umat beragama.
7. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan fungsi pranata sosial dan kelompok profesional untuk menghasilkan generasi yang mencintai ketertiban, taat hukum, dan saling menghargai.
8. Memperkuat kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan.
9. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik dan forum-forum diskusi politik.
10. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi pemuda dalam kehidupan bernegara

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedua

Misi kedua Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mengembangkan kebudayaan dan berbagai potensi alam daerah sebagai bagian dari warisan dunia.

6.2.1. Strategi Misi Kedua

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedua, sebagai berikut.

1. Pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat.
2. Peningkatan status kawasan konservasi menjadi kawasan konservasi dunia (*World Heritage Sites*, Cagar Biosfer).
3. Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya alam di kawasan Hutan , taman laut dan kawasan terumbu karang Wallacea
4. Pelestarian kawasan konservasi (Taman Nasional: Bunaken, dan Bogani Nani Wartabone; Cagar Alam: Tangkoko, Dua Sudara; Suaka Margasatwa: Manembo-nembo, Karakelang; Taman Wisata Alam: Batu Putih, Batu Angus).
5. Pemantapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
6. Penetapan kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA).
7. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah (Cagar Budaya).
8. Pengembangan penulisan buku dan pemberian penghargaan bagi penulis daerah.
9. Pengembangan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

6.2.2. Arah Kebijakan Misi Kedua

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kedua, sebagai berikut.

1. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sanggar-sanggar budaya serta komunitas adat untuk melestarikan budaya lokal serta menjadi sarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mendorong perbaikan dan pembenahan kawasan konservasi untuk menjaga kelestariannya serta melakukan berbagai upaya yang diperlukan agar kawasan-kawasan tersebut menjadi kawasan konservasi dunia.
3. Melakukan upaya untuk menetapkan kawasan konservasi baru untuk memperluas cakupan upaya pelestarian alam.

4. Mendorong dan melakukan berbagai tindakan untuk membenahi daerah perlindungan laut dan perlindungan Mangrove untuk mencegah bencana yang berasal dari laut dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang kondusif.
5. Penetapan kawasan konservasi baru termasuk pengembangan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) dan Taman Hutan Raya (TAHURA).
6. Pelestarian peninggalan benda dan situs bersejarah dalam bentuk pengelolaan Cagar Budaya
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan termasuk di dalamnya penulisan buku mengenai lingkungan dan budaya serta penghargaan bagi para penulisnya.
8. Memprioritaskan pembangunan yang memiliki dampak negatif yang paling minimal bagi lingkungan serta mengembangkan berbagai upaya untuk menghindarkan kalangan dunia usaha untuk melakukan tindakan yang merusak lingkungan hidup.

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketiga

Misi Ketiga Pemerintah Sulawesi Utara adalah memantapkan penerapan *Clean Government* dan *Good Governance* yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal.

6.3.1. Strategi Misi Ketiga

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketiga, sebagai berikut.

1. Pemantapan reformasi birokrasi.
2. Peningkatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah
3. Peningkatan peran monitoring dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
4. Peningkatan fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)
5. Pencapaian dan pemantapan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata
6. Pemantapan pelayanan perijinan terpadu di seluruh kabupaten/kota
7. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik, termasuk upaya pengembangan program non budgeter
8. Meningkatkan kemampuan aparat pengelola keuangan serta penyediaan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban yang tepat waktu, melaksanakan pengendalian anggaran belanja
9. Meningkatkan koordinasi pengelolaan sumber penerimaan daerah, peningkatan pelayanan penatausahaan administrasi dan peningkatan sistem dan sumber daya manusia
10. Pemantapan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah
11. Peningkatan kompetensi tenaga kediklatan, pengembangan program kegiatan diklat, peningkatan fasilitasi diklat
12. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang ada dalam pembentukan responsibilitas serta sinergitas pemerintahan
13. Mendorong peningkatan kekuatan lembaga KORPRI sebagai organisasi yang menaungi anggotanya

14. Mendorong peningkatan penyediaan kesejahteraan anggota KORPRI menuju ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
15. Penerapan Pemerintah yang transparan, akuntabel
16. Sinergitas pelaksanaan program dan fungsi pemerintahan di tingkat Provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota

6.3.2. Arah Kebijakan Misi Ketiga

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketiga, sebagai berikut.

1. Mengembangkan struktur birokrasi yang miskin struktur namun kaya fungsi serta pengisian sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.
2. Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan pemerintah daerah
3. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
4. Intensifikasi dan fasilitasi pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan
5. Mendorong perbaikan berkelanjutan atas sistem administrasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pemerintah Provinsi dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat mencapai predikat tersebut.
6. Mendorong kegiatan investasi di daerah melalui pelayanan perijinan terpadu
7. Mendorong pengembangan aparat pemerintah untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas sehingga kualitas pelayanan publik semakin meningkat.
8. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
9. Mendorong peningkatan kinerja aparatur di bidang pelayanan administrasi dan peningkatan penerimaan daerah yang ditunjang dengan sistem dan sarana dan prasarana memadai
10. Mengembangkan penataan dan perbaikan kinerja DPRD Prov. Sulut menjadi lebih maksimal sehingga menghasilkan produk-produk DPRD yang berkualitas dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
11. Mendorong dan memfasilitasi SDM tenaga kediklatan untuk mengikuti MOT (*Management of Training*), TOC (*Training of Course*), TOT (*Training of Trainers*) dan diklat penjenjangan lainnya, mengembangkan kualitas maupun kuantitas kegiatan diklat serta meningkatkan fasilitas diklat
12. Peningkatan kapasitas aparatur lewat sosialisasi dan kegiatan analisis beban kerja sesuai tupoksi
13. Pembentukan lembaga konsultasi bantuan hukum dalam pendampingan bagi anggota-anggota KORPRI yang bermasalah dengan hukum
14. Penguatan program-program peningkatan kesejahteraan dalam hal penyediaan saran pemukiman yang baik
15. Mendorong perbaikan sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, pertanggungjawaban dan kinerja pemerintah daerah
16. Mendorong koordinasi lintas satuan kerja di tingkat Provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meminimalkan tumpang tindih program sehingga belanja pemerintah menjadi efektif, efisien dan berdaya jangkauan lebih luas

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempat

Misi keempat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki harapan hidup yang panjang, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berprestasi.

6.4.1. Strategi Misi Keempat

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempat, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun
2. Percepatan penuntasan buta aksara
3. Pemberian beasiswa kepada anak-anak bertalenta dan berprestasi
4. Peningkatan jumlah sarana dan mutu pendidikan nonformal
5. Peningkatan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan
6. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas pendidikan PAUD, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa non formal
7. Penerapan pendidikan budi pekerti sejak dini
8. Peningkatan jumlah dan mutu fasilitas perpustakaan dan kearsipan.
9. Perwujudan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal dan vulkanologi di Indonesia Timur
10. Peningkatan dan pemantapan manajemen berbasis sekolah.
11. Perluasan dan peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan dan politeknik.
12. Pengembangan dan peningkatan standar infrastruktur sekolah-sekolah
13. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
14. Pengembangan laboratorium penelitian terpadu
15. Peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
16. Pengadaan dan pengembangan kelembagaan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.
17. Peningkatan dan perluasan peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Peningkatan prestasi dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional serta kesejahteraan atlet-atlet daerah
19. Penyiapan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional maupun internasional melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar internasional serta mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan turnamen olahraga nasional.
20. Peningkatan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan atlet berprestasi
21. Pengembangan teknologi informasi kesehatan
22. Perlakuan khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya di daerah terpencil dan perbatasan
23. Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal)
24. Peningkatan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan

6.4.2. Arah Kebijakan Misi Keempat

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempat, sebagai berikut.

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan. dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun
2. Mengembangkan program-program yang dibutuhkan untuk mempercepat penuntasan buta aksara.
3. Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pendidikan non formal yang lebih berkualitas.
5. Mengembangkan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas di daerah terpencil dan kawasan perbatasan dalam rangka pemerataan pendidikan yang berkualitas
6. Menambah dan memelihara serta meningkatkan fasilitas pendidikan PAUD, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan informal, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, non formal.
7. Mendorong penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah-sekolah maupun pendidikan non formal untuk menciptakan generasi penerus yang memiliki tata krama yang baik serta berakhlak mulia.
8. Mendorong pengembangan jumlah dan kualitas perpustakaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan penguasaan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana kearsipan
9. Mendorong upaya menjadikan Sulawesi Utara sebagai hub pendidikan kelautan, geothermal, dan vulkanologi di Indonesia Timur dalam rangka meningkatkan daya saing sumber daya daerah.
10. Mendorong pengembangan manajemen berbasis sekolah untuk menghasilkan sistem pendidikan yang selaras dengan era global
11. Meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan kesehatan, kejuruan, dan politeknik
12. Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan dan memelihara fasilitas sekolah-sekolah sehingga suasana belajar menjadi lebih kondusif untuk pencapaian prestasi peserta didik yang lebih baik serta pembentukan sikap dan perilaku.
13. Mendorong upaya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mencerdaskan masyarakat
14. Mendorong pengembangan laboratorium penelitian terpadu untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas dunia.
15. Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK untuk meningkatkan daya saing masyarakat Sulawesi Utara dalam persaingan global
16. Mendorong berkembangnya sekolah yang berstandar nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Sulawesi Utara
17. Meningkatkan dan memperluas peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan.
18. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi atlet dalam kejuaraan olahraga nasional maupun internasional sebagai sarana untuk promosi daerah serta upaya meningkatkan kesejahteraan atlet-atlet daerah untuk menghasilkan atlet-atlet daerah yang berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional

19. Mengembangkan Sulawesi Utara sebagai tempat penyelenggaraan olahraga nasional maupun internasional lewat pembangunan dan peningkatan fasilitas olahraga berstandar internasional
20. Mendorong partisipasi dan peningkatan prestasi pemuda dalam kehidupan bernegara
21. Mengimplementasikan teknologi informasi kesehatan untuk tenaga medis maupun staf kesehatan
22. Meningkatkan jumlah dan mutu kesehatan, kejuruan, dan politeknik
23. Menambah dan melakukan maintenance untuk peningkatan fasilitas kesehatan (formal dan informal)
24. Meningkatkan kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima

Misi Kelima Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah memberdayakan pelaku bisnis dalam kegiatan ekonomi global, regional dan lokal yang berbasiskan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi.

6.5.1. Strategi Misi Kelima

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kelima, sebagai berikut.

1. Penyiapan dan pelengkapan *database* perekonomian dan pusat informasi bisnis.
2. Penyiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK.
3. Pelaksanaan deregulasi Peraturan Daerah (PERDA) yang menghambat investasi dan menetapkan PERDA yang mendorong akselerasi perekonomian daerah.
4. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*).
5. Peningkatan aksesibilitas permodalan, pemasaran, dan teknologi
6. Peningkatan promosi produk UMKM.
7. Peningkatan penguasaan teknologi.
8. Pemantapan dan peningkatan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*).
9. Penciptaan wiraswasta perempuan dan pemuda muda lokal (*local women and young entrepreneur*).
10. Pemantapan dan optimalisasi fungsi kelembagaan Koperasi.
11. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan sistem usaha bagi KUKM
12. Pengembangan ekonomi kreatif lokal.

6.5.2. Arah Kebijakan Misi Kelima

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelima, sebagai berikut.

1. Mengembangkan upaya untuk menyediakan *database* perekonomian yang lebih akurat serta pusat informasi bisnis dalam rangka menarik investasi dan mendukung kegiatan dunia usaha.
2. Mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan-kawasan pendukung KEK.

3. Melakukan kaji ulang terhadap berbagai Peraturan Daerah (PERDA) yang dianggap dapat menghambat investasi agar kebijakan deregulasi yang dilakukan akan lebih tepat dan terarah.
4. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan pihak swasta untuk menciptakan sinergitas yang kokoh dalam membangun Sulawesi Utara berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang dimiliki serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.
5. Mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal, pasar dan teknologi tepat guna
6. Mengembangkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak untuk melakukan promosi UMKM agar memperkuat pasar para pelaku UMKM tersebut.
7. Mendorong penggunaan dan penguasaan teknologi tepat guna, baik di kalangan pemerintah di Sulawesi Utara, kalangan bisnis, dan para petani.
8. Memantapkan dan meningkatkan kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil, dan penyumberluaran (*outsourcing*).
9. Mendorong upaya pembentukan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda serta mendorong pengembangan kegiatan usaha para wiraswasta muda dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
10. Mendorong pengembangan koperasi yang berkualitas untuk menjadi sokoguru yang solid bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan anggotanya.
11. Mendorong peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan kewirausahaan baru serta pengembangan sistem usaha bagi KUKM
12. Mengembangkan ekonomi kreatif lokal bercirikan produk unggulan daerah.

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keenam

Misi Keenam Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab

6.6.1. Strategi Misi Keenam

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keenam, sebagai berikut.

1. Penyediaan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pemantapan pelaksanaan *e-government*
3. Penyediaan fasilitas media massa.
4. Pengembangan sistem informasi *online*.
5. Pengembangan proporsi masyarakat pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi.

6.6.2. Arah Kebijakan Misi Keenam

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keenam, sebagai berikut.

1. Mempersiapkan sarana pusat informasi provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta mendukung kegiatan usaha dan pariwisata lewat informasi yang kredibel.

2. Mendorong penerapan lebih lanjut *e-government* untuk mendorong kecepatan dan keandalan informasi pemerintah serta meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong pengembangan fasilitas media massa yang representatif agar informasi disampaikan lebih berkualitas.
4. Mendorong pengembangan sistem informasi *online* untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
5. Mendorong proporsi masyarakat pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.7. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketujuh

Misi Ketujuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan.

6.7.1 Strategi Misi Ketujuh

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketujuh, sebagai berikut.

1. Peningkatan pengamanan dan keamanan di kawasan perbatasan dan pintu-pintu masuk dari segala macam bentuk kejahatan.
2. Peningkatan perdagangan lintas batas.
3. Pemantapan dan pembukaan jalur transportasi lintas batas, baik udara maupun laut.

6.7.2. Arah Kebijakan Misi Ketujuh

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketujuh, sebagai berikut.

1. Mendorong koordinasi antar institusi-institusi yang berhubungan dengan masalah keamanan untuk mengamankan wilayah perbatasan dari gangguan-gangguan dan mencegah masuknya pelaku kejahatan trans nasional.
2. Mendorong pengembangan perdagangan lintas batas untuk meningkatkan perekonomian daerah perbatasan serta daerah yang lain di Sulawesi Utara.
3. Mendorong pengembangan jalur transportasi lintas batas untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta manusia.

6.8. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kedelapan

Misi Kedelapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mewujudkan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik.

6.8.1. Strategi Misi Kedelapan

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kedelepan, sebagai berikut.

1. Pembangunan dan peningkatan fasilitas serta penambahan sarana bantu navigasi pelabuhan Samudera Bitung.
2. Pembangunan dan perluasan jaringan pelayaran dan penerbangan internasional.
3. Peningkatan fasilitas penumpang, barang, dan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Sam Ratulangi.
4. Penyiapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
5. Pelaksanaan kerjasama dan sosialisasi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang kepada propinsi-propinsi tetangga, pelaku bisnis (eksportir dan importir), perusahaan pelayaran *Internasional—Main line Operator (MLO)*—dan nasional.
6. Peningkatan peran sektor swasta serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif terlibat dalam bisnis nasional dan internasional.

7. Meningkatkan promosi dan peluang investasi serta meningkatkan pelayanan investor untuk memperlancar investasi di daerah.

6.8.2. Arah Kebijakan Misi Kedelapan

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kedelapan, sebagai berikut.

1. Mendorong pengembangan fasilitas utama dan pendukung pelabuhan Samudera Bitung agar lebih siap untuk menjadi *International Hub Port* (IHP).
2. Mendorong pengembangan fasilitas pelabuhan-pelabuhan lain di Sulawesi Utara untuk mendukung sistem transportasi laut dan udara yang lebih komprehensif di Sulawesi Utara.
3. Mendorong pengembangan fasilitas Bandara International Sam Ratulangi agar dapat lebih menarik bagi maskapai domestik maupun internasional serta meningkatkan kenyamanan bagi pemakai bandara
4. Mengembangkan berbagai upaya untuk menghadirkan Kawasan Ekonomi (KEK) di Sulawesi Utara dan memperkuat kawasan-kawasan pendukungnya lewat penyiapan lahan serta infrastruktur pendukung.
5. Mendorong pengembangan bandara-bandara perintis di kabupaten kepulauan untuk mendukung lalu lintas manusia serta barang dan jasa terutama bila kondisi laut tidak memungkinkan dan mengembangkan berbagai upaya sosialisasi dan kerjasama dengan provinsi-provinsi tetangga dan perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Timur dan Pasifik.
6. Mendorong pihak swasta daerah serta asosiasi-asosiasi bisnis untuk lebih aktif dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional sehingga dapat memberi nilai tambah yang lebih besar bagi daerah.
7. Memperbaiki iklim investasi di daerah dengan mempermudah ketentuan syarat penanaman modal, memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi serta insentif bagi investor.

6.9. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesembilan

Misi Kesembilan Pemerintah Sulawesi Utara adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Utara dan Indonesia Timur Bagian Utara.

6.9.1. Strategi Misi Kesembilan

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kesembilan, sebagai berikut.

1. Pembenahan sarana dan prasarana pariwisata.
2. Pemantapan peran dan fungsi badan promosi pariwisata.
3. Peningkatan dan pelaksanaan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan branding tentang Sulawesi Utara.
4. Peningkatan tata nilai sosial budaya.

6.9.2. Arah Kebijakan Misi Kesembilan

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kesembilan, sebagai berikut.

1. Mendorong dan berpartisipasi dalam pembenahan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup situs-situs wisata, perhubungan ke lokasi wisata, pusat cenderamata, dan pusat informasi pariwisata.
2. Memantapkan peran dan fungsi badan promosi pariwisata.
3. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas pelayanan industri pariwisata melalui penambahan akses penerbangan Internasional, pembangunan terminal kapal pesiar Internasional, pusat seni, pusat kebudayaan, pusat souvenir khas Sulawesi Utara, museum-museum, pusat informasi pariwisata, dan meningkatkan kerjasama promosi pariwisata dengan propinsi-propinsi sekitar, serta melakukan promosi ke mancanegara maupun melaksanakan iven-iven lokal, nasional, dan internasional secara berkala selanjutnya menciptakan branding tentang Sulawesi Utara.
4. Meningkatkan tata nilai sosial budaya.

6.10. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesepuluh

Misi Kesepuluh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional.

6.10.1. Strategi Misi Kesepuluh

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kesepuluh, sebagai berikut.

1. Pembentukan badan kerjasama Internasional: *North Sulawesi Global Partners (NSGP)*.
2. Pemantapan kerjasama sub-regional *Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)*.
3. Pemantapan kerjasama antar daerah: antar kabupaten/kota dan provinsi, Badan Kerjasama Propinsi-propinsi Kepulauan, Kawasan Timur Indonesia (KTI), Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), dan kerjasama pengelolaan Teluk Tomini.
4. Pembangunan kualitas keberadaan Sekretariat *Coral Triangle Initiative (CTI)*.

6.10.2. Arah Kebijakan Misi Kesepuluh

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kesepuluh, sebagai berikut.

1. Mendorong pembentukan badan kerjasama international untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
2. Mendorong pemantapan kerjasama sub-regional *Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East Asean Growth Area (BIMP-EAGA)* agar menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi Sulawesi Utara serta mitra kerjasama.
3. Mendorong pemantapan kerjasama antara daerah untuk pengelolaan sumber daya secara optimal dan menguntungkan semua pihak.
4. Mendorong percepatan pembangunan Sekretariat *Coral Triangle Initiative (CTI)* untuk meningkatkan partisipasi dan promosi Sulawesi Utara di kancah internasional.

6.11. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kesebelas

Misi Kesebelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah memantapkan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan fasilitas penunjang perekonomian daerah.

6.11.1. Strategi Misi Kesebelas

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kesebelas, sebagai berikut.

1. Melakukan revitalisasi lahan, revitalisasi perbenihan dan perbibitan, revitalisasi infrastruktur dan sarana, revitalisasi SDM, revitalisasi pembiayaan petani dan peternak, kelembagaan petani serta revitalisasi teknologi dan industri hilir
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar
3. Mendorong pengembangan kawasan minapolitan, peningkatan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan masyarakat pesisir serta pengembangan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap
4. Pengembangan budidaya perkebunan melalui kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan integritasi; pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); peningkatan kualitas SDM petani dan pelaku usaha perkebunan dan peningkatan kemitraan lembaga usaha/permodalan
5. Pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan kerjasama penelitian
6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyuluh; pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyuluhan; meningkatkan hubungan kerjasama dengan asosiasi, federasi dan organisasi serta pelaku usaha serta meningkatkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga permodalan

6.11.2. Arah Kebijakan Misi Kesebelas

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kesebelas, sebagai berikut.

1. Mendorong upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan
2. Menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan, pengembangan sistem distribusi pangan, melaksanakan diversifikasi panganekaragaman konsumsi pangan menuju gizi seimbang, pembinaan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan, mencegah/menangani keadaan rawan pangan dan gizi serta penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan.
3. Melakukan optimalisasi potensi perikanan budidaya dan tangkap, pengembangan infrastruktur penunjang usaha perikanan, industri perikanan, pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
4. Mendorong pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan potensi dan keunggulannya, mendorong dan memfasilitasi pengembangan SDM petani dan pelaku usaha perkebunan; mendorong pengembangan hasil olahan tanaman perkebunan dan turunannya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
5. Mendorong pembangunan pusat-pusat riset dan pengembangan di bidang pertanian dan perikanan bekerjasama untuk memperoleh hasil yang dapat diterapkan serta lebih berkualitas.
6. Mendorong perbaikan kesejahteraan penyuluh; penguatan kelembagaan penyuluh di kabupaten/kota; melaksanakan bintek/pelatihan bagi penyuluh, peningkatan sarana

dan prasarana pendukung penyuluhan serta peningkatan koordinasi dan fasilitasi antar sub sektor.

6.12. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keduabelas

Misi keduabelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah menyediakan infrastruktur publik yang memadai.

6.12.1. Strategi Misi Keduabelas

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keduabelas, sebagai berikut.

1. Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagai acuan pengembangan wilayah
2. Pembangunan dan peningkatan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan
3. Pembangunan dan peningkatan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
4. Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku
5. Pengembangan air-strip dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta
6. Pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan energi baru dan terbarukan seperti: panas bumi, air, matahari, angin, arus laut dan lainnya
7. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi dan air tanah
8. Penambahan dan pemeliharaan fasilitas kebersihan dan sanitasi
9. Pengembangan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih
10. Peningkatan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada
11. Pengembangan sarana rekreasi petualangan alami (outdoor adventure recreation)
12. Pengembangan sarana rekreasi mass tourism

6.12.2. Arah Kebijakan Misi Keduabelas

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keduabelas, sebagai berikut.

1. Koordinasi penyusunan rencana tata ruang Provinsi bersama kabupaten/kota
2. Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan ekonomi biaya tinggi
3. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses jalan ke sentra-sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk memudahkan penjualan hasil-hasil produksi serta mengurangi disparitas harga hasil-hasil produksi tersebut antara kota dan desa
4. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih dan air baku
5. Mendorong pengembangan air-strip dan bandara di kabupaten/kota oleh pihak swasta untuk membentuk jaringan transportasi udara yang terintegrasi

6. Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama yang tersedia secara lokal dalam pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun maupun yang akan ditingkatkan.
7. Mendorong pemanfaatan air tanah sebagai sarana air bersih bagi masyarakat/ daerah sulit air bersih
8. Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menambah dan memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi serta mendorong masyarakat untuk ikut serta memelihara fasilitas kebersihan dan sanitasi
9. Mengembangkan perumahan yang layak huni dan terjangkau harganya dengan ketersediaan sanitasi dan air bersih
10. Meningkatkan fasilitas hiburan dan rekreasi umum yang sudah ada
11. Mendorong pengembangan sarana rekreasi petualangan alami (*outdoor adventure recreation*)
12. Mengembangkan sarana rekreasi *mass tourism*

6.13. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Ketigabelas

Misi Ketigabelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah mengelola sumber daya alam secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap akibat-akibat perubahan iklim.

6.13.1. Strategi Misi Ketigabelas

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Ketigabelas, sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam
2. Identifikasi dan pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang baru, serta pemeliharaan sumber-sumber air bersih yang telah ada
3. Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya mineral yang berkelanjutan serta optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan energi panas bumi
4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang mineral, panas bumi dan air tanah
5. Inventarisasi kawasan lingkungan geokologi sebagai sumber dari sumber daya energi dan mineral dan pembuatan petanya sebagai dasar untuk melakukan pengawasan dan penertiban.
6. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan konservasi dan diversifikasi energi
7. Peningkatan kapasitas SDM bidang ESDM yang berkualitas dan profesional
8. Perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan
9. Peningkatan pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan air tanah untuk masyarakat
10. Kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana secara intensif
11. Pembuatan regulasi (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim dan bencana
12. Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penanganan dampak perubahan iklim dan bencana kepada masyarakat
13. Peningkatan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana

6.13.2. Arah Kebijakan Misi Ketigabelas

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Ketigabelas, sebagai berikut.

1. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam agar memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, dan meminimalisasi kerusakan lingkungan
2. Mengembangkan upaya identifikasi sumber-sumber air bersih yang baru serta pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber air yang telah ada untuk menjaga ketersediaan air bersih untuk rumah tangga dan dunia usaha
3. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi panas bumi yang berwawasan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan
4. Mendorong pemanfaatan sumber daya mineral secara bijaksana untuk menunjang pembangunan berkelanjutan
5. Membuat peta geologi teknik dan kawasan lingkungan geokologi sebagai data dasar penunjang perencanaan fisik dan tata ruang untuk pengawasan serta penertiban
6. Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak dan gas bumi
7. Meningkatkan kesadaran SDM bidang ESDM untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerjanya
8. Menciptakan perlindungan sumber daya hutan sebagai penyangga ekonomi dan kehidupan
9. Mendorong pemanfaatan hasil penyelidikan dan pemetaan sumber daya geologi dan geologi lingkungan untuk perencanaan tata ruang
10. Mengembangkan kampanye program mitigasi terhadap perubahan iklim secara intensif untuk membentuk kesiapan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan iklim yang ada serta memperkecil dampak negatif yang ditimbulkannya
11. Mengembangkan Peraturan Daerah (PERDA) yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim dan bencana untuk memberikan kekuatan hukum dalam upaya membangun suatu kemampuan melakukan adaptasi perubahan iklim dan bencana
12. Mendorong dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pemantapan kerjasama internasional terkait perubahan iklim dan bencana
13. Meningkatkan peran aktif secara global dalam upaya penanganan dampak perubahan iklim dan bencana

6.14. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Keempatbelas

Misi keempatbelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah melaksanakan penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial dengan memperhatikan kepentingan kaum perempuan, anak dan lanjut usia.

6.14.1. Strategi Misi Keempatbelas

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Keempatbelas, sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi dan peran perempuan di segala aras
2. Perlindungan terhadap hak-hak anak
3. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan
4. Perlindungan terhadap hak-hak Lansia
5. Peningkatan kualitas perempuan dan anak
6. Pengembangan serta pemantapan program pengawasan masyarakat terhadap perlindungan anak

6.14.2. Arah Kebijakan Misi Keempatbelas

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Keempatbelas, sebagai berikut.

1. Mendorong dan mengembangkan upaya meningkatkan kompetensi dan peran perempuan di segala aras untuk meningkatkan kesetaraan gender di Sulawesi Utara
2. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak
3. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terlibat aktif dalam perlindungan hak-hak anak
4. Berperan aktif untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak lansia
5. Mendorong dan memfasilitasi institusi-institusi yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak
6. Berperan aktif melakukan perlindungan anak

6.15. Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelimabelas

Misi Kelimabelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (petani, nelayan, buruh, dan pegawai).

6.15.1. Strategi Misi Kelimabelas

Strategi untuk mencapai sasaran Misi Kelimabelas, sebagai berikut.

1. Pencapaian target-target *Millenium Development Goals (MDGs)*
2. Penjaminan hak-hak pegawai dan buruh
3. Peningkatan dan penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja
4. Penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian
5. Dorongan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan, dan pegawai

6.15.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran Misi Kelimabelas, sebagai berikut.

1. Mendorong dan mengembangkan upaya pencapaian target-target *Millenium Development Goals (MDGs)*
2. Mendorong dunia usaha untuk menjamin hak-hak pegawai dan buruh lewat suatu sistem pengawasan kerjasama industrial yang lebih baik
3. Mendorong pelatihan untuk peningkatan dan penguasaan teknologi bagi tenaga para pekerja
4. Mendorong penetapan UMR Provinsi sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian
5. Mendorong dan berperan dalam meningkatkan penguasaan teknologi inovatif bagi petani, nelayan dan pegawai untuk meningkatkan produktifitas kerja dsan kesejahteraan mereka serta mendorong peningkatan ekonomi daerah